

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Adanya calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU disebabkan oleh karena kegagalan calon independen dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU pada pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU. Selain itu, ada beberapa faktor yang memicu munculnya calon tunggal seperti adanya dinamika politik yang kini mewarnai politik lokal di Kabupaten OKU, popularitas dan elektabilitas yang tinggi dalam pasangan calon tunggal Kuryana-Johan yang membuat parpol memilih untuk saling berkerja sama membentuk adanya koalisi dari hampir keseluruhan parpol yang menduduki kursi DPRD.

Dalam aspek politis, kemunculan calon tunggal terjadi karena adanya monopoli politik yaitu sistem borong partai dimana oknum partai akan mendatangi partai-partai yang ada untuk diajak bernegosiasi agar setuju untuk tidak memajukan calon yang mereka punya. Sehingga pada akhirnya terbentuklah calon tunggal yang pada akhirnya maju untuk bersaing melawan kotak kosong pada pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020.

Calon tunggal yang ada pada pemilihan kepala daerah adalah skenario politik yang didalangi oleh partai calon tunggal tersebut. Calon tunggal bernegosiasi dengan hampir seluruh partai-partai besar yang menduduki kursi DPRD untuk ikut berkoalisi membentuk calon tunggal tersebut dengan adanya *money politic* sebagai imbalannya.

Atas berhalangan tetapnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten OKU kemudian menyebabkan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU, terdapat beberapa dampak dari hal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk memilih oleh masyarakat menjadi terbatas oleh karena hanya ada satu calon yang maju di pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Masyarakat hanya diberikan satu pilihan sehingga tidak dapat membandingkan visi dan misi mana yang menurut mereka layak untuk dijadikan pemimpin Kabupaten OKU kedepannya.
2. Pemerintahan tentunya sangat berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Keterpilihan calon tunggal yang kemudian

tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya akan mengakibatkan terhambatnya kebijakan-kebijakan seperti sulitnya penanda tangan pensiun oleh staf pemerintahan yang tidak dapat dilakukan oleh plh. Juga kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dijanjikan pada masa kampanye maupun proyek-proyek pembangunan yang dulunya sudah direncanakan seharusnya dibuat kemudian menjadi terhambat.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pilkada, sejumlah partai politik yang ada diranah lokal seharusnya mampu memajukan anggota mereka dalam suatu pilkada. Hal ini merupakan bukti dari fungsi parpol sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pilkada inilah seharusnya parpol menunjukkan kecakapannya dalam mengenali masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Selain itu, pemerintah seharusnya mengetatkan pentingnya melihat *track record* dalam penyeleksian calon Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya akan maju dalam pilkada. Serta perlunya edukasi lebih mendalam di masyarakat secara meluas tentang biografi dan visi/misi pada calon yang akan maju di pilkada. Dan memeberi edukasi kepada masyarakat dalam memahami pentingnya partisipasi dari suara tiap-tiap orang dalam pilkada terhadap masa depan daerah.